

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan implikasi penelitian yang dirumuskan dari deskripsi temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian dalam Bab IV.

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Kesimpulan Umum

Status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai politik berperan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 terutama dalam menentukan pilihan calon Bupati. Peningkatan partisipasi politik dapat dilakukan dengan memantapkan status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai dengan melakukan program PKn melalui pendidikan politik yang bukan saja dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh partai politik, karena salah satu tujuan PKn terciptanya warga negara yang berpartisipasi politik. Selain itu, tercipta partisipasi politik warga negara yang dapat melakukan perubahan menjadi lebih baik dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik sehingga perlu adanya

M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pengetahuan dan keterampilan atau *civic knowldege*, *civic skills* melalui pendidikan politik salah satunya dilakukan oleh partai politik yang tidak hanya sebatas kelompok ideologisnya saja karena partai politik sebagai organisasi politik dapat menempatkan orang dalam jabatan-jabatan politik berarti akan menentukan kebijakan publik yang berdampak luas terhadap kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu adanya program PKn yang dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya adalah partai politik secara sinergi dan berkesinambungan agar terwujud warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi (warga negara yang baik dan cerdas).

- a. Keberhasilan dalam upaya peningkatan partisipasi politik warga negara merupakan tanggung jawab bersama seperti masyarakat, dunia pendidikan, partai politik, pemerintah dan semua kalangan dalam menciptakan negara yang berdemokrasi Pancasila.
- b. Ideologi partai politik, pola kepemimpinan, dan pendidikan politik merupakan tolak ukur kredibilitas partai politik dalam menjalankan fungsi partai.
- c. Kualitas warga negara yang cerdas dalam mengambil keputusan, yaitu berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku, sehingga tercapai harmonisasi kehidupan demokrasi yang berdasarkan konstitusi yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional.

M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Kesimpulan Khusus

Adapun kesimpulan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Status sosial ekonomi pemilih berperan dalam meningkatkan partisipasi politik meskipun belum signifikan hal ini dikarenakan masih terdapat pemilih yang berpendidikan tinggi dan berpendapatan mapan kurang percaya terhadap partai politik dan pemilih yang memiliki pendidikan dan pendapatan rendah serta pekerjaan yang kurang mapan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terlebih dahulu daripada kehidupan politik.
- b. Kualitas partai politik terdiri dari pendidikan politik kognitif, pendidikan afektif, ideologi partai, dan pola kepemimpinan berperan secara berarti dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Bandung pada pemilihan Bupati tahun 2010 pada tingkatan cukup, sehingga partai politik dapat dijadikan sebagai sarana program PKn di masyarakat yang sinergis dan berkesinambungan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab) demi tercapai kepentingan nasional dan tujuan nasional.
- c. Status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai berperan berarti secara simultan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010, dengan demikian diperlukan peningkatan status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai secara simultan.

M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- d. Partisipasi politik berdampak dalam keikutsertaan menyalurkan hak pilih (datang ke TPS dan mencoblos) dan sikap memilih masyarakat pada pemilihan Bupati Kabupaten Bandung pada tahun 2010, dengan partisipasi tingkat penonton sikap memilih Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 ditentukan juga oleh penilaian terhadap karakter dan *track record* kandidat yaitu pasangan Dadang Naser dan Deden Rumaji.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan penelitian berimplikasi pada:

1. Partisipasi politik warga negara merupakan salah satu prasyarat dalam kehidupan demokrasi sehingga perlu adanya peningkatan peran partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi dan melakukan pendidikan politik yang memuat nilai-nilai demokratis dengan jangka waktu tak terbatas. Seberapa jauh derajat pengaruhnya tingkat partisipasi politik warga negara dipengaruhi oleh kualitas pemilih sendiri (pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan) dan kualitas partai (ideologi partai politik, pola kepemimpinan partai politik, dan pendidikan politik).
2. Peranan kualitas partai politik yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku yang berlandaskan Pancasila sehingga mencerminkan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Hal ini supaya terjadi peningkatan partisipasi politik dan kecerdasan

M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

serta karakter warga negara dalam sikap mengambil keputusan dalam memilih atau mencalonkan menjadi pemimpin bangsa. Pengembangan kompetensi warga negara yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions* diperlukan pengembangan pendidikan politik yang kontinue yang dilakukan sinergi antara lingkup pendidikan, partai politik, pemerintah, masyarakat dan keluarga, disamping perlunya komitmen partai politik dalam melakukan peran dan fungsinya dan harus bersikap akomodatif terhadap warga negara sehingga partisipasi politik warga negara tidak berhenti setelah memberikan suara dalam pemilihan.

3. Penelitian ini juga membawa implikasi bagi PKn bahwa materi yang diajarkan kepada peserta didik tidak hanya *text book* tetapi melihat fakta-fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan teori yang diajarkan sehingga membangun generasi muda sebagai penerus bangsa yang cerdas dan baik yaitu berpikir kritis, bertanggung jawab, jujur, amanah, visioner, religius, dan demokratis.
4. Sikap memilih warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang tepat dan cerdas dapat dibangun oleh warga negara sendiri dengan model *participation rural appraisal* yang didukung oleh partai politik, pemerintah, sekolah, dan media. *Citizenship education* berjalan dengan baik apabila model pola kinerja partai politik yang berwawasan kebangsaan serta *Participation Rural Appraisal* (PRA) memang benar-benar terlaksana karena masyarakat memberdayakan

M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sendiri terhadap apa yang mereka miliki sehingga mengetahui problematika mereka sendiri dan dapat memecahkannya dalam berbagai segi kehidupan dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan warga negara Indonesia.



M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

C. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka dapat disarankan:

1. Saran Umum

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukan hanya pemenang pemilu harus melakukan kebijakan secara menyeluruh terkait peningkatan partisipasi politik warga negara yang didukung dengan pendidikan politik baik melalui jalur formal maupun nonformal.

2. Saran Khusus

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut:
 - 1) Harus melakukan upaya nyata untuk meningkatkan status sosial ekonomi pemilih masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
 - 2) Menggalakkan pendidikan politik untuk memberhasilkan sosialisasi kebijakan publik secara *bottom up*.
- b. Bagi partai politik agar melakukan peran dan fungsinya sebagaimana ketentuan Undang-Undang sehingga partai memiliki kualitas dan berperan aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi warga negara, adapun upaya yang harus antara lain sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendidikan politik dengan memasukkan kajian PKn baik dari aspek kognitif dan sikap secara kontinue dan terstruktur tidak hanya pada waktu menjelang pemilu ataupun pemilukada yang selama ini pendidikan

M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

politik dihentikan setelah proses pemungutan suara selesai untuk membuat warga negara menjadi *melek politik* dengan pemberdayaan masyarakat.

- 2) Partai politik harus memosisikan Ideologi Pancasila konsisten, perbedaan dalam kekhususan seharusnya tetap bermuara pada kepentingan nasional Indonesia.
 - 3) Adanya kesepakatan antar partai politik untuk tidak melakukan pembodohan dan penipuan kepada masyarakat seperti *money politic* dan adanya *shadow state*.
 - 4) Tidak memberikan janji-janji fantastis di luar batas kewajaran untuk dapat dipenuhi.
 - 5) Meningkatkan kredibilitas sehingga tidak menyebabkan masyarakat pemilih bersikap apatis, karena hal ini dapat merusak nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, dan pada gilirannya mengancam kepentingan nasional.
- c. Bagi dunia pendidikan, khususnya Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya dapat mengantisipasi kondisi tersebut di atas dengan melakukan penyusunan kurikulum PKN dan pembekalan terhadap pengajar mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tidak hanya secara teori, akan tetapi harus dilengkapi dengan perbandingan aplikasi yang terjadi di lapangan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka kesempatan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode kualitatif tentang partisipasi

M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

masyarakat yang muncul karena rangsangan materi yang menyangkut status sosial ekonomi, pola kepemimpinan partai politik, dan masa depan nasionalisme bangsa Indonesia.



M. Yahya Arwiyah, 2012

Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu